

PROSIDING



www.kpshk.org

**“NOL
PEMANASAN BUMI,
RAWA-GAMBUT
UNTUK
KEHIDUPAN”**



FESTIVAL ORANG RAWA-GAMBUT SEINDONESIA

HOTEL SALAK-BOGOR, 21-22 APRIL 2009



Konsorsium Pendukung Sistem Hutan Kerakyatan (KpSHK): Jalan Sutiragen V No.14, Indraprasta I, Bogor-Indonesia 16153, Telp: 0251 8380 301, Fax: 0251 8380 301, e-mail: kpshk@kpshk.org

Konsorsium Pedukung Sistem Hutan Kerakyatan
Consortium for Supporting Community based Forest System Management

Sekretariat: Jl. Sutiragen V No.14, indraprasta I - Bogor. Jawa Barat. Indonesia 16153
ph: 0251-8380301, Fax: 0251-8380301. email: Hkpshk@kpshk.org web:

2009

I. PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Indonesia adalah negara dengan hutan rawa-gambut tropis terluas di dunia. Indonesia memiliki 38 juta hektar hutan rawa-gambut tropis (Departemen Kehutanan, 1997). Prestise ini sekaligus menjadi bumerang, riset Wetland Internasional (2007) menyebutkan Indonesia sebagai emitor karbon terbesar ke-3 dunia, karena kebakaran hutan rawa-gambutnya pertahun.

Kondisi tersebut adalah keniscayaan, hutan rawa-gambut tropis di Sumatera, Kalimantan dan Papua semakin berkurang. Luas hutan rawa-gambut (*forestswamp*) Indonesia saat ini seluas 26 juta hektar. Hutan rawa-gambut Sumatera pada 10 tahun silam masih seluas 7,2 juta hektar, kini tinggal 6 juta hektar.

Berkurangnya luas hutan rawa-gambut Sumatera sejalan dengan 20% emisi karbon yang dilepas dari proses deforestasi dan degradasi hutan akibat kebakaran, alih fungsi dan pemanfaatan lain dari hutan (termasuk hutan rawa-gambut) di Indonesia (WWF, 2008). Sejak revitalisasi kehutanan dan pertanian (ekstensifikasi lahan) di 2004, hutan rawa-gambut saat ini diperuntukkan bagi perluasan perkebunan sawit, hutan tanaman industri (dan hutan tanaman rakyat pola kemitraan), pertambangan dan lahan-lahan tanaman untuk bahan bakar nabati (minyak sawit dan jarak).

Sementara itu hutan (lindung dan produksi) rakyat di Sumatera mencapai 40% dari total areal kawasan hutan Sumatera (Registrasi Kawasan Kelola Rakyat-KpSHK, 2005). Hampir 20 juta orang (masyarakat lokal atau adat) hidup di Kawasan Kelola Rakyat. Dan selama ini, kelompok-kelompok masyarakat ini yang disebut sebagai biang kerusakan hutan dan lingkungan. Padahal, secara turun-temurun masyarakat yang sering disebut perambah, pelaku kebakaran lahan dan hutan ini adalah masyarakat lokal (adat) yang memiliki kearifan lokal (pengetahuan dan budaya) dalam memelihara sumber-sumber penghidupannya (*livelihood*).

Hampir dari seluruh aktivitas penghidupan masyarakat lokal (adat) di kawasan rawa-gambut tidak menimbulkan kerusakan lingkungan. Bahkan ada beberapa pengetahuan masyarakat berguna bagi perlindungan dan pelestarian lingkungan semisal *Smong* di Semelue-Aceh. Secara khusus, beberapa temuan mutakhir aktivitas masyarakat lokal (adat) di Sumatera dapat dijumpai seperti hal-hal berikut:

1. Di komunitas adat Anak Nagari Amping Parak, Pesisir Selatan, Sumatera Barat, sejak komunitas adat mengenal perkebunan sawit di 300 ha lahan rawa-gambut (bekas areal transmigrasi perkebunan sawit), komunitas adat sudah tidak melakukan tradisi panen raya dari hasil bertani sawah dan ladang dalam 10 tahun terakhir. Pengairan sawah-sawah di wilayah tersebut terganggu oleh alih fungsi hutan rawa-gambut menjadi areal kebun sawit.
2. Di komunitas adat Melayu Riding, yang berada dalam wilayah administrasi 12 desa di Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan, masyarakat sudah tidak lagi

melakukan tradisi sonor (menaman padi di rawa-gambut) dalam 5 tahun terakhir, akibat masuk dan beroperasinya beberapa perusahaan perkebunan sawit dan hutan tanaman industri di wilayah OKI. Prediksi pasang-surut air di lahan (rawa-gambut) dalam pengetahuan

3. setempat berubah, bahkan nyaris tidak dapat diprediksi sama sekali dalam 3 tahun terakhir ini. Selain itu komunitas adat ini juga memiliki tradisi berladang (berkebun) karet yang diperoleh dari interaksi dengan komunitas luar (Lampung) melalui perdagangan hasil kerajinan tikar purun (purun, jenis rumput rawa-gambut).
4. Di komunitas adat Air Angat, Kerinci, Jambi, terjadi perubahan cara bertani sawah. Dalam 30 tahun terakhir ini, komunitas adat yang sebagian besar lahan produksinya di areal lahan basah atau rawa, pertanian sawah mereka yang dulu subsisten menjadi modern (intensifikasi, dengan penggunaan pupuk dan traktor mini sebagai pengganti tenaga kerbau). Perubahan ini menyebabkan Kenduri Pusako, Pesta Danau, dan Turun Sawah lebih cepat dilaksanakan, yang dulu tradisi-tradisi tersebut hanya dilaksanakan dalam hitungan puluhan tahun menjadi hampir setiap tahun. Selain itu, areal rawa masyarakat Air Angat yang menjadi tempat tumbuhnya rumput rawa sebagai bahan dasar kerajinan tikar terancam oleh pembangunan daerah yang akan menjadikan areal produksi masyarakat tersebut menjadi kawasan perkantoran dan pasar.
5. Di komunitas adat Batanghari, Muara Jambi, Jambi, berladang dan berkebun buah (duku dan durian), bertani padi rawa-gambut menjadi tradisi pertanian yang jarang dilakukan oleh setiap penduduk. Areal ladang dan kebun mereka, sebagian besar sudah dikonversi menjadi kebun sawit mandiri, perkebunan sawit dan hutan tanaman industri. Akibatnya, tradisi panen raya hampir sama sekali tidak dilakukan. Temuan lainnya, di kawasan penyangga Taman Nasional Berbak (Ramsar) sudah dibuka untuk areal perkebunan besar kelapa sawit oleh pemerintah daerah setempat.
6. Di komunitas adat Melayu Semenanjung Kampar, Riau, pertanian sagu dan perikanan darat (perikanan sungai) mulai tergusur oleh perluasan perkebunan sawit dan hutan tanaman industri. Komunitas adat ini sudah tidak melakukan tradisi panen ikan sungai dan panen raya dalam 10 tahun terakhir, karena sebagian besar masyarakatnya sudah beralih dari tradisi bertani dan berladang menjadi pekebun mandiri sawit dan memburuh di hutan tanaman industri. Padahal pemenuhan kebutuhan pangan (ikan, padi dan sagu) di Kota Pekanbaru dipenuhi dari wilayah-wilayah pertanian masyarakat adat di Semenanjung Kampar.

Goldman dalam *Privatizing Nature* (1998) menyebutkan, “komunitas tidak perlu menjadi kelompok ekologis, karena mereka sudah sangat tergantung dengan alamnya. Komunitas dengan sendirinya akan memelihara secara lestari sumber daya alamnya demi keberlangsung hidup mereka”. Sejalan dengan pernyataan Goldman, Sistem Hutan Kerakyatan (SHK) sudah berlangsung lama di masyarakat lokal (adat). Dalam berbagai bentuk atau model pengelolaan, SHK membawa nilai-nilai (norma) sosial dan lingkungan dalam pengelolaan kawasan hutan. Nilai-nilai SHK tersebut adalah kebersamaan, kemandirian, kelestarian dan keberlanjutan.

Kondisi lain, deforestasi dan degradasi rawa-gambut juga menimbulkan dampak bagi keberadaan flora dan fauna yang dilindungi karena keberadaannya yang hampir punah. Rawa-gambut di Sumatera, sebagai satu kesatuan ekosistem hutan tropis dataran rendah adalah habitat bagi satwa-satwa dilindungi seperti harimau sumatera dan orangutan, serta jenis tanaman kayu khas rawa-gambut seperti ramin, jelutung, benuang, meranti rawa, bulian dan lain-lain. Jumlah harimau sumatera (*Panthera tigris sumatraensis*) saat ini tinggal sekitar 200-an. ekor, populasi orangutan se-Indonesia (*Pongo abelii* dan *Pongo pygmeus*) sebanyak 25.000 dari 315.000 ekor di tahun 1990- (Departemen Kehutanan, 2004).

Temuan dan beberapa persoalan di atas, tidak dipungkiri, berada dalam beberapa pengaruh kebijakan kehutanan dan perkebunan 10 tahun terakhir ini semisal Undang-Undang Kehutanan No.41 tahun 1999 beserta turunannya yang terbaru PP No.6 2007 jo PP No.3 tahun 2008, dan Undang-Undang Otonomi Daerah. Desentralisasi pemerintahan telah menyebabkan pembukaan hutan rawa-gambut untuk pengembangan kebun sawit baru yang mencapai 50-100 ribu ha pertahun (Sawit Watch, 2008), Jikalahari (2007) mencatat 864.325 ha (rawa-gambut kedalaman 3 meter lebih) menjadi areal HTI atau 45% dari seluruh konsesi HTI di Riau dan di Jambi, dimana 230.624 ha kawasan gambut yang memiliki kedalaman lebih dari 3 meter dikonversi menjadi HTI (70% dari luasan HTI yang ada di Jambi).

Perubahan kebijakan kehutanan, pertanian, dan pemerintahan tersebut berdampak pula kepada ketertarikan investasi di sektor kehutanan dan pertanian. Sebanyak 151 perusahaan HTI dan 29 perusahaan bubur kertas yang mendaftarkan diri untuk industri tersebut, lebih dari separuh (60) dari perusahaan-perusahaan tersebut menyatakan diri bangkrut setelah mengambil kayu dan hutan primer serta mendapat insentif Dana Reboisasi. Tanaman kayu untuk bubur kertas yang tetap beroperasi hingga kini adalah grup usaha besar yang mempunyai industri hilir seperti: Sinar Mas (Asia Pulp & Paper), Raja Garuda Mas Group (APRIL), Barito Pacific Group (Toba Pulp and Paper) dan Kiani Kertas yang sedang *reoperate*.

Semua persoalan ekosistem rawa-gambut yang saling bertautan di atas dan menyebabkan hubungan sebab-akibat yang berkepanjangan antara perubahan kebijakan, investasi dan industri kehutanan-pertanian, keselamatan ekosistem dan manusia, perubahan iklim dan penyelamatan bumi, maka KpSHK (Konsorsium Pendukung Sistem Hutan Kerakyatan) berinisiatif untuk mengumpulkan semua pihak pemangku kepentingan (masyarakat adat, konservasi satwa dan tumbuhan, pelaku usaha dan industri, pendukung perubahan sosial dan lingkungan serta pemerintah daerah-pusat) di sektor kehutanan-pertanian agar secara bersama-sama mengungkapkan persoalan-persoalan dan peluang perbaikan dari kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan yang sudah terjadi. Inisiatif KpSHK tersebut dituangkan dalam acara Festival Orang Rawa-Gambut se-Indonesia dengan tema **“No! Pemanasan Bumi, Rawa-Gambut untuk Kehidupan”**.

1.2. WAKTU DAN TEMPAT

Festival Orang Rawa-Gambut se-Indonesia dilaksanakan selama dua hari, yakni pada tanggal 21-22 April di Hotel Salak Bogor.

1.3. PANITIA PENYELENGGARA

| | | |
|------------------|---|--------------------------|
| Penanggung Jawab | : | M. Djauhari |
| Ketua Pelaksana | : | Sutrisno |
| Administrasi | : | Annisa Safitri |
| Finance | : | Sari Siregar dan Sugimin |
| Logstrans | : | Sugiyono, Gun dan Wanda |

1.4. PESERTA

Festival Orang Rawa-Gambut se-Indonesia yang bertujuan untuk menggugah semua pemangku kepentingan sektor kehutanan-pertanian yaitu lembaga konservasi satwa dan tumbuhan, lingkungan hidup dan sumberdaya alam, pelaku usaha dan industri kehutanan, masyarakat adat, petani hutan, LSM, lembaga pemberi hibah, dan pemerintah lokal-nasional-internasional, khususnya yang memanfaatkan kawasan rawa-gambut untuk kehidupan. Peserta yang hadir dalam acara ini berjumlah 61 Orang dalam kegiatan Workshop dan 250 orang dalam kegiatan Seminar dan Eksebisi (Daftar undangan terlampir).

1.5. SUSUNAN ACARA

Festival Orang Rawa-Gambut se-Indonesia merupakan rangkaian acara sebagai berikut:

1. Workshop Multipihak Rawa-Gambut untuk Kehidupan

Hotel Salak-Bogor, 21 April 2009

2. Seminar "Rawa-Gambut untuk Kehidupan"

Hotel Salak-Bogor, 22 April 2009. Secara rinci susunan acaranya adalah sebagai berikut:

| No | Acara | Narasumber | Waktu |
|--|---|--|---------------|
| 1 | Registrasi Peserta | | 08.30 - 09.15 |
| 2 | Art Performance (Pembukaan) | Sanggar Tari "Mayang Arum" | 09.15 - 10.00 |
| Sesi I Rawa-Gambut untuk Kehidupan" | | | |
| 3 | Kebijakan Kehutanan tentang Rawa-Gambut | Sony Keraf (Komisi Lingkungan-DPR RI) | 10.00 - 10.15 |
| 4 | Persoalan Sosial dan Ekologi di Rawa-Gambut | Mohammad Djauhari, Koordinator KpSHK-Bogor | 10.15 - 10.30 |
| 5 | Dampak Pembukaan Rawa-Gambut terhadap Iklim | Fitrian Ardiansyah (WWF) | 10.30 - 10.45 |
| 6 | Testimoni Orang Rawa-Gambut | (Sumatera, Kalimantan dan Papua) | 10.15 - 10.30 |
| 7 | Diskusi Sesi I | | 10.30 - 11.30 |

| No | Acara | Narasumber | Waktu |
|--|--------------------------------------|--|---------------|
| 8 | Break I | | 11.30 - 12.30 |
| Sesi II | | | |
| Diskusi Panel: | | | |
| Alih Fungsi dan Pemanfaatan Rawa-Gambut | | | |
| 9 | Sektor Perkebunan Sawit dan bio-fuel | Maruli Gultom (PTPN V), Abet Nego Tarigan (Sawit Watch), Arya Hadi Dharmawan (FEMA-IPB) | 12.30 - 13.15 |
| 10 | Sektor Hutan Tanaman Industri | Neil Franklin (April-Sustainability Director), Bustar Maitar (Greenpeace), Ir. Herman, MS. Masnellyarti Hilman (Deputi III LH) | 13.15 - 14.00 |
| | Diskusi Sesi II | | 14.00 - 15.00 |
| Break II | | | |
| 15.00 - 15.15 | | | |
| 11 | Keynote Speaker | Farah Sofa | 15.15 - 15.45 |
| 12 | Penutupan Tari " Banjar Kemuning" | Sanggar Mayang Arum | 15.45 - 16.15 |

**3. Pasar Hasil Hutan Bukan Kayu, Penayangan Dokumentasi, dan Pameran Publikasi
"Nol Pemanasan Bumi, Rawa-Gambut"**
Hotel Salak Bogor, 22 April 2009

II. WORKSHOP MULTI PIHAK RAWA GAMBUT UNTUK KEHIDUPAN

2.1. Pembukaan

| | |
|---------------------|---|
| <i>Hari/tanggal</i> | : Selasa, 21 April 2009 |
| <i>Tempat</i> | : Pakuan Room - Hotel Salak Bogor |
| <i>Pukul</i> | : 09.00 – 09.10 wib |
| <i>Materi</i> | : Pembukaan Workshop Multipihak Rawa Gambut untuk Kehidupan |
| <i>Fasilitator</i> | : M.Djauhari (Koordinator KpSHK Bogor) |

Workshop dibuka langsung oleh coordinator KpSHK Bogor yakni M. Djauhari tepat pada pukul 09.00 WIB. Workshop ini dihadiri oleh beberapa pihak yang terkait dengan keberadaan ekosistem Rawa Gambut yakni masyarakat lokal di sekitar rawa gambut, pemerintahan, serta LSM. Peserta yang hadir dalam workshop ini berjumlah 52 Orang. Dalam pembukaan ini pembicara menerangkan mengenai KpSHK dan memaparkan harapan serta tujuan yang ingin diperoleh dari workshop ini yakni melestarikan ekosistem Rawa Gambut yang pada akhirnya dapat mensejahterakan masyarakat disekitar rawa gambut.

2.2. Perkenalan Peserta

| | |
|---------------------|-----------------------------------|
| <i>Hari/tanggal</i> | : Selasa/ 21 april 2009 |
| <i>Tempat</i> | : Pakuan Room - Hotel Salak Bogor |
| <i>Pukul</i> | : 09.10-09.52 WIB |
| <i>Materi</i> | : Perkenalan |
| <i>Fasilitator</i> | : Joko Waluyo |

Perkenalan dilakukan dengan melakukan game kecil. Setiap peserta dibagikan HVS berwarna dan spidol. Kemudian diinstruksikan oleh fasilitator untuk dilipat menjadi dua dan peserta diinstruksikan untuk menggambar. Satu sisi peserta diinstruksikan untuk menggambarkan pengalaman yang paling berkesan pada masa lalu dan satu sisi lagi berisi gambar tentang harapan dan keinginan yang ingin diwujudkan pada masa mendatang.

Peserta selanjutnya membentuk kelompok dan berkumpul berdasarkan warna kertas yang diberikan yakni kuning, biru dan merah muda. Kemudian setiap peserta secara bergiliran saling menceritakan pengalaman yang paling berkesan dan keinginan-keinginan masa lalu. Pada umumnya harapan setiap peserta adalah ingin lingkungan kembali seperti saat dulu, saat masih asri dan hijau.

2.3. Coffee Break (10.00-10.30)

2.4. Sharing Pengalaman dari Masing-Masing Wilayah Kerja

| | |
|---------------------|---|
| <i>Hari/tanggal</i> | : Selasa/ 21 april 2009 |
| <i>Tempat</i> | : Pakuan Room - Hotel Salak Bogor |
| <i>Pukul</i> | : 10.30-11.50 WIB |
| <i>Materi</i> | : Sharing Pengalaman dari Masing-Masing Wilayah Kerja |
| <i>Fasilitator</i> | : Farid |

Peserta workshop terdiri dari 3 komponen yakni masyarakat, LSM, dan Pemerintahan . Sharing dilakukan oleh peserta berdasarkan region masing-masing. Dibentuk dua kelompok besar yakni region Sumatra dan Kalimantan. Persoalan yang diangkat yakni persoalan ekologi, ekonomi, dan sosial di wilayah lahan gambut pada region masing-masing.

Panitia menyediakan beberapa alat tulis sebagai media penyampaian pengalaman yakni Kertas Plano, spidol, *double stick tape*. Setiap kelompok di berikan waktu menyiapkan bahan presentasi selama 30 menit. Karena waktu tidak mencukupi, maka waktu diskusi dalam kelompok diperpanjang 30 menit. Sehingga total waktu diskusi adalah 60 menit. Setiap kelompok terdapat seorang yang bertindak sebagai moderator dalam diskusi dan adapula yang bertugas sebagai pencatat hasil diskusi. Hasil diskusi dituliskan di kertas plano dan hasil akhir yang diperoleh pada setiap kelompok adalah permasalahan yang mereka temui di kawasan ekosistem gambut dari aspek ekologi, ekonomi, dan sosial.

Kelompok Sumatera melakukan diskusi secara terstruktur, dimana mereka membahas secara runtut permasalahan-permasalahan yang terjadi dari setiap aspek ekologi, ekonomi dan sosial yang ada di kawasan Rawa Gambut. Diskusi dimoderatori oleh Saudara Muslich. *Pertama kali kelompok dari region Sumatera berdiskusi permasalahan dari aspek ekologi yang diawali oleh pihak pemerintahan, dimana pihak pemerintah mengutarakan bahwa Rawa Gambut yang dalam kawasan perlindungan dikelola dalam sistem taman nasional. Taman nasional memiliki 3 aspek yaitu aspek pemanfaatan, pelastarian dan pengawetan. Adapun permasalahan yang terjadi di lapang saat ini adalah pal batas yang hilang, perambahan dan illegal logging. Posisi masyarakat saat ini adalah pemerintah merupakan mitra dari masyarakat. Lalu dilanjutkan oleh peserta kedua dari perwakilan daerah Riau. Dimana mengutarakan bahwa kawasan Riau 80% adalah Rawa Gambut, tetapi saat ini telah terjadi kerusakan ekologi karena pembangunan dari kanal-kanal, yang menyebabkan gambut semakin terkikis. Permasalahan lahan rawa gambut di Riau yang kedua adalah sistem pengelolaan lahan yang salah di Kabupaten Siak. Permasalahan yang ketiga di Riau adalah kawasan yang penting untuk ekosistem jenis burung air sudah tidak ada lagi, adapun permasalahan yang terjadi dilapangan adalah belum terwakili atau mencakup antara hutan suaka alam dan cagar alam di Rawa Gambut dan pengintrepatasian secara landcover tidak sesuai, karena telah terlihat dipeta udara bahwa suatu lahan termasuk hutan tersebut tidak produktif dan menyebabkan HTI dengan seenaknya masuk, padahal dalam kenyataannya di lapangan hutan tersebut sangat produktif. Permasalahan yang keempat untuk di Riau adalah masuknya perkebunan sawit di daerah Riau yang menggunakan pupuk pestisida menyebabkan permasalahan untuk ekologi, hal ini dikarenakan belum terdapat jaringan kawasan yang dilindungi dan kawasan rawa gambut yang ada di Indonesia saat ini hanya produksi.*

Selanjutnya dilanjutkan oleh peserta dari perwakilan Aceh, *peserta menyampaikan terdapat beberapa masalah ekologi yang terjadi di lahan rawa gambut yaitu kurangnya kontrol dari para ahli yang terkait, maka menyebabkan beralih fungsi ke perusahaan. Di aceh terdapat beberapa permasalahan ekologi yaitu susah nya air bersih, penurunan beberapa jenis ikan secara populasi, langkanya keberadaan Orang Utan di daerah Tripa, suhu semakin panas, populasi pisang endemik yang ada di lahan gambut Aceh saat ini secara ekologi tidak bisa hidup lagi dan munculnya beberapa penyakit. Permasalahan tersebut diindikasikan akibat lemahnya dan belum jelasnya instrumen hukum yang ada, jadi dalam proses pengelolaannya belum jelas secara pasti untuk menangani suatu masalah, oleh karena itu Kepres no.32 tahun 1990 tentang pengelolaan kawasan lindung harus direvisi atau ditinjau kembali. Selanjutnya dilanjutkan oleh peserta dari Sumatera Selatan, dimana terdapat beberapa permasalahan ekologi kawasan rawa gambut antara lain, habitat rawa gambut telah mulai rusak akibat dari intervensi manusia dan alami, belum mantabnya jaringan kawasan yang dilindungi di daerah rawa gambut, inkonsistensi kebijakan yang ada, terutama terkait dengan kawasan lindung rawa gambut, penurunan kualitas lingkungan hidup dan penurunan populasi dan ragam jenis hayati yang ada di ekosistem rawa gambut.*

Setelah diskusi untuk aspek ekologi selesai maka dilanjutkan dalam aspek ekonomi, peserta mengungkapkan bahwa, *perusahaan yang masuk di kawasan rawa gambut belum*

memberikan kontribusinya secara nyata kepada masyarakat sekitar dalam hal meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adapun garis besar permasalahan aspek ekonomi di region Sumatera adalah perusahaan yang masuk ke kawasan tidak memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat, terbatasnya ruang kelola dan pemanfaatan lahan bagi masyarakat yang merupakan sumber perekonomian satu-satunya akibat adanya perusahaan yang masuk, habianya jalan lintas tani dan hilangnya mata pencaharian masyarakat, tanaman rumbia semakin mahal, karena keberadaannya di alam sudah sangat langka, kebijakan-kebijakan dari pemerintah daerah yang tidak sesuai dengan kenyataan dilapangan dan permasalahan yang terakhir adalah banyaknya hasil hutan non kayu yang berpotensi tetapi dalam hal pemasaran masih sulit untuk saat ini. Diskusi yang terakhir adalah membahas permasalahan yang terjadi di Rawa gambut dalam aspek sosial, adapun pernyataan dari peserta dari region Sumatera adalah dampak sosial yang terjadi adalah adanya konflik antara masyarakat dan pemerintah swasta, kriminalitas dan pelanggaran hak asasi manusia dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan ekosistem rawa gambut di wilayahnya masing-masing.

Diskusi Region Kalimantan dipimpin oleh Bapak Gunung Wallenstein Sinaga dari Balai Taman Nasional Tanjung Puting. Diskusi yang dilakukan kurang terstruktur sehingga pada akhir diskusi peserta sulit menemukan hasil diskusi.

Pada awalnya diskusi dilakukan oleh tiap-tiap perwakilan dengan memberikan testimoni. Peserta yang merupakan perwakilan LSM Yayasan Cakrawala Indonesia (YCI) memberikan testimoni mengenai permasalahan ekonomi yang bisa berdampak pada kelestarian keanekaragaman hayati yang ada di wilayah kerjanya. Permasalahan tersebut adalah budidaya ikan yang bersifat predator yang dapat mengancam keberadaan ikan-ikan yang lain. Pernyataan ini langsung ditanggapi oleh peserta lain dengan memberikan saran dan solusi yang dpata dilakukan. Solusi yang diberikan yaitu dengan mengganti ikan tersebut dengan komoditi lain yang lebih tinggi nilai ekonominya dan tidak mengancam keanekaragaman hayati di sekitarnya.

Testimoni lain diberikan oleh masyarakat lokal di Danau Sentarum. Masyarakat saat ini sedang resah dengan pembangunan kebun sawit. Pembangunan kebun sawit saat ini sudah merugikan masyarakat karena sebagian besar mengambil area ladang masyarakat serta pupuk yang berdampak buruk pada pertanian masyarakat. Selain itu, di danau sentarum sering terjadi konflik antara masyarakat dengan Taman Nasional mengenai batas kawasan. Hal ini diakibatkan kuarang adanya sosialisasi batas kawasan kepada masyarakat. Masyarakat juga kurang mengetahui program-program yang akan dilakukan oleh Taman Nasional dan LSM yang wilayah kerjanya di Danau Sentarum. Masyarakat juga merasa tidak punya kekuatan dalam melwan pemerintahan ataupun memberi inisiatif kepada pemerintahan atauoun pihak-pihak yang terkait dalam upaya-upaya pelestarian ekosistem Rawa Gambut. Hal ini langsung dikomentari oleh peserta lain berupa dukungan untuk tetap berjuang bersama-sama melalui desanya. Jalur yang paling baik adalah melalui Bupati untuk memperjuangkan hak-hak masyarkat dan melestarikan ekosistem Rawa Gambut. Kesemua testimoni yang diberikan dirangkum oleh salah satu peserta yang merupakan perwakilan dari WALHI Kalbar dan akan dipresentasikan pada sesi selanjutnya.

Sesi ini selanjutnya diisi *sharing* dari Ibu Emy Hafild perwakilan dari Kemitraan. Awalnya, beliau direncanakan untuk membuka acara workshop, namun ibu Emmy baru bisa hadir pada saat pertengahan workshop. Ibu Emmy menyampaikan pengalaman-pengalaman

beliau, dan harapan dari kegiatan ini. Secara garis isi *sharing* Ibu Emmy Hafild adalah sebagai berikut :

Saat ini di dunia kehutanan sedang diterapkan desentralisasi kehutanan. Di dalam desentralisasi tersebut, pengambilan kebijakan yang terkait dengan kehutanan tidak lagi tergantung oleh pusat. Tetapi ditetapkan oleh pemerintahan setempat yakni bupati. Hal ini bisa menjadi ancaman dan peluang bagi kehutanan termasuk di dalamnya lahan gambut. Oleh karena itu, perlu ada kerjasama masyarakat yang ada di dalam dan diluar (berbagai pihak). Jika tidak terjalin kerjasama yang baik, akan merugikan masyarakat itu sendiri. Contohnya di daerah Indragiri hulu yakni terdapat kesalahan pengolahan lahan gambut dengan pembukaan kanal sehingga membatasi ruang gerak ekonomi masyarakat.

Inti pengelolaan di lahan gambut adalah air yang merupakan sirkulasi utama pengelolaan air di suatu daerah misalnya di Riau. Selain air, gambut memiliki peran sebagai bank karbon yang dapat memicu tingginya emisi karbon. Oleh karena itu, pengelolaan lahan gambut perlu dikelola secara maksimal. Beberapa contoh kasus, masyarakat memiliki ketergantungan tinggi terhadap masyarakat. Pengeringan gambut sebenarnya tidak menguntungkan masyarakat, tetapi malah merugikan masyarakat. Konversi sejuta lahan gambut juga merubah pola hidup masyarakat. Misalnya: perubahan pola pertanian.

Selain masyarakat dan LSM, Pemerintah harus berperan penting dalam hal kebijakan untuk menyelamatkan ekosistem rawa gambut termasuk masyarakat di dalamnya, untuk itu perlu dikembangkan model-model pengelolaan yang didalamnya menyentuh tingkat sosial dan ekonomi. Untuk itu saat ini perlu dikembangkan kerjasama dengan kabupaten-kabupaten, apalagi dengan diterapkannya desentralisasi kehutanan. Misalnya : Jikalahari, Riau.

Saat ini masyarakat harus berjuang di tingkat kabupaten untuk menentukan kebijakan lahan gambut karena saat ini frontline dalam penentuan kebijakan adalah pemerintahan kabupaten. Oleh karena itu masyarakat harus bermitra dengan pemerintahan di kabupaten serta menekan pemerintahan untuk menjaga ekosistem hutan gambut.

Sesi *Sharing* ini, Ibu Emmy juga memberi kesempatan pada peserta untuk berdiskusi. Diskusi yang terjadi adalah sebagai berikut:

- T** : Tantangan ke dapan, kita harus mencegah emisi karbon. Apa yang akan menjadi kesimpulan akhir lokakarya ini untuk dapat mendukung pencegahan emisi karbon dan mendukung masyarakat ekosistem rawa gambut? (.....-Burung Indonesia)

J : Saat ini kita perlu mengesampingkan pengurangan emisi karbon. Tujuan utama adalah menyejahterakan masyarakat salah satunya melalui HKM. Cara ini, selain dapat menyejahterakan masyarakat di sekitar kawasan gambut, juga secara langsung dapat mengurangi emisi karbon karena kelestarian ekosistem gambut tetap terjaga.
- T** : Di daerah sentarum, terdapat perkebunan sawit. Bagaimana cara mengatasi perubahan lahan menjadi kawasan sawit ? (Masyarakat Region Kalimantan-Kapuas Hulu)

J : Bupati sudah mengeluarkan perda mengenai hutan di kawasan danau sentarum. Masyarakat harus pendekatan kepada bupati. Masyarakat juga harus mengadakan dialog dengan LSM setempat yakni FFI mengenai apa yang akan dilakukan. Karena kawasan Danau Sentarum merupakan daerah perbatasan, terdapat beberapa rencana peningkatan kesejahteraan masyarakat perbatasan, salah satunya dengan perkebunan. Oleh karena itu dilakukan pendekatan pula ke menko polkam. Pada intinya, untuk mencegah perubahan lahan hutan menjadi perkebunan sawit harus dilakukan dialog dengan berbagai pihak.

Selain pertanyaan, terdapat juga opini dari Gunung W. Sinaga perwakilan dari Taman Nasional Tanjung Puting, yakni sbb :

Saat ini, ancaman yang paling tinggi dalam pemanfaatan lahan gambut adalah perkebunan. Solusi yang diberikan adalah HKM tetepi tidak mungkin karena sudah dikembangkan menjadi kebun. Persoalan yang sesungguhnya adalah masyarakat tetap memnuntut hak untuk lahan gambut. Masyarakat juga dapat memanfaatkan HHNK. Sesuai dengan undang-undang maka pengambilan HHNK di TN dilarang. Oleh karena melalui forum ini pemerintah sebaiknya meninjau kembali peraturan mengenai pemanfaatan sumberdaya hayati di taman nasional. Karena masyarakat masih memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap hutan. Perlu dimungkinkannya pemanfaatan kawasan taman nasional oleh masyarakat yang mengacu pada kondisi masyarakat. Perlu ditinjau kembali pemanfaatan dan cara-cara pemanfaatan yang benar. (Opini-Gunung W. Sinaga-TNTP)

Opini ini kemudian ditanggapi oleh Ibu Emmy :

Setiap warga negara memiliki hak untuk memanfaatkan sumberdaya, dilindungi, diberi fasilitas, dll. Karena sudah mendapatkan haknya, masyarakat perlu melaksanakan tanggung jawab. Sesuai undang-undang kawasan hutan dikuasai oleh Negara dan dikelola untuik sebesar-besar kemakmuran rakyat. Tapi hal ini perlu ditinjau kembali. Masyarakat juga harus tahu kewajiban dalam memelihara ekosistem lahan gambut. sejahtera dari keberadaan hutan gambut, Laju kerusakan hutan saat ini tinggi karena peninggalan zaman soeharto. Masyarakat juga menerima dampak dari kondisi ini, Karena pemerintah pada zaman soeharto lupa bahwa masyarakat merupakan bagian daripada ekosistem hutan. Saat ini, pemerintah sudah mulai menyadari bahwa masyarakat adalah bagian dari ekosistem. Tetapi harus dipikirkan pula apakah masyarakat dapat lagi beradaptasi jika lahan gambut direhabilitasi kembali. Kondisi saat ini, Masyarakat sudah terbiasa dengan kehidupan gambut yang kering. Oleh karena itu, perlu dipikirkan bagaimana amenjaga kelestarian lahan gambut dan masyarakat tidak terpinggirkan, bagaimana masyarakat dapat menjadi bagian dari ekosistem tersebut.

Banyaknya tanggapan atas sharing Ibu Emmy menyebabkan panitia menambah durasi waktu yakni 30 menit. Sesi ini berakhir pukul 12.30 da dilanjutkan dengan sesi ISHOMA.

2.5. ISHOMA (12.30-13.30)

2.6. Diskusi Grup Terfokus (FGD)

Hari/tanggal : Selasa/ 21 april 2009
Tempat : Pakuan Room - Hotel Salak Bogor
Pukul : 14.30-14.30 WIB
Materi : Presentasi dan Diskusi Grup Terfokus (FGD)
Fasilitator : Farid

Sesi ini mundur dari jadwal yang telah disepakati. Seharusnya sesi ini dimulai pada pukul 13.30 WIB, namun peserta baru masuk ruangan pukul 14.00 WIB. Diskusi ini merupakan lanjutan dari sesi sebelumnya. Pada diskusi ini peserta dari dua region mempresentasikan hasil diskusi yang telah mereka lakukan sebelumnya. Sebelum masuk ke sesi inti, peserta diajak untuk untuk bermain game. Game yang dilakukan adalah game untuk menguji konsentrasi yakni game bermain angka (Game 123 Boom). Setelah itu lima peserta yang kalah dalam game dihukum dengan pantun yang memakai bahasa daerah masing-masing.

Peserta pertama yang mempresentasikan hasil diskusinya adalah region Kalimantan, presentasi dibawakan oleh Suwanto dari yayasan Cakrawala Indonesia Kalimantan Tengah. Isi dari presentasi kelompok region Kalimantan adalah sebagai berikut:

Secara garis besar permasalahan yang ada di sekitar Ekosistem Rawa Gambut dibagi menjadi tiga yakni ekologi, ekonomi, dan sosial.

Secara rinci permasalahan yang ada adalah sebagai berikut:

a. Ekologi

1. *Terancamnya kawasan hutan karena perusahaan kelapa sawit masuk.*
2. *Hilangnya flora fauna karena lahan rawa gambut di tanami kelapa sawit*
3. *Tercemarnya lingkungan akibat perusahaan kelapa sawit*

b. Ekonomi

1. *Ruang gerak ekonomi masyarakat semakin sempit, karena adanya perlindungan lahan gambut.*
2. *Masyarakat masih dibatasi oleh perizinan yang mempersulit mereka melakukan kegiatan perekonomian.*
3. *Kesulitan masyarakat dalam pemasaran produksi ikan dan rotan (Hasil Hutan Non Kayu)*
4. *Pemerintah tidak membantu secara nyata tentang permasalahan perekonomian di kawasan lahan gambut.*

c. Sosial

1. *Belum jelasnya perbatasan antara kawasan Taman Nasional dan kawasan bebas masyarakat.*
2. *Kurangnya sosialisasi pemerintah tentang pal batas atau batas wilayah pengelolaan taman nasional, sehingga masyarakat belum banyak mengetahui tentang pal batas.*
3. *Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan di Kalimantan.*

Di akhir presentasi, perwakilan dari region Kalimantan mengharapkan berbagai pihak untuk membantu masyarakat di Kalimantan

Selanjutnya, diteruskan oleh kelompok region Sumatra. Yang diwakili oleh Muslich dari LSM Burung Indonesia. Isi presentasi kelompok region Sumatra adalah sebagai berikut:

a. Ekologi

Permasalahan setelah kawasan rawa gambut dijadikan sebagai perkebunan:

- a. *Rusaknya habitat rawa gambut, yang disebabkan oleh:*
- b. *Intervoensi manusia: untuk menanam kelapa sawit*
- c. *Intervoensi alami: kebakaran*
- d. *Jaringan kawasan dilindungi untuk ekosistem rawa gambut belum mantab.*
- e. *Inkonsentrasi kebijakan yang ada, terutama terkait dengan kawasan lindung rawa gambut. Kepres 32 tahun 1990 belum terealisasikan secara nyata di lokasi dan menyebabkan rawa gambut semakin terancam.*
- f. *Penurunan kualitas lingkungan hidup masyarakat sekitar rawa gambut contoh: kurangnya air bersih, munculnya penyakit kulit dan suhu semakin meningkat.*
- g. *Penurunan populasi dan keanekaragaman jenis hayati ekosistem lahan gambut.*
- h. *Sistem pengelolaan rawa gambut yang belum maksimal, misalnya tata batas. Perusahaan menggunakan kanal-kanal untuk mengelola air di rawa gambut.*

i. *Belum ada jaringan-jaringan kawasan yang dilindungi, untuk habitat satwaliar yang ada di rawa gambut.*

b. Ekonomi

Permasalahan yang ada untuk aspek ekonomi di kawasan rawa gambut daerah Sumatera adalah:

- a. *Dengan merubahnya kawasan rawa gambut dijadikan menjadi perkebunan tidak berdampak positif, biaya hidup justru menjadi mahal dan semakin meningkat karena adanya pabrik di tempat tersebut. Masyarakat asli sekitar Rawa Gambu tidak sejahtera dengan masyarakat pekerja yaitu pendatang.*
- b. *Perubahan rawa gambut dijadikan perkebunan milik perusahaan menjadikan terbatasnya ruang kelola masyarakat.*
- c. *Berkurangnya atau semakin menyempitnya ruang matapencarian para masyarakat sekitar rawa gambut . Contoh: berkurangnya keberadaan nipah, ikan semain berurang, rumbia semakin langka yang berdampak harga semakin tinggi.*
- d. *Kebijakan-kebijakan dari pemerintah tentang pengelolaan rawa gambut belum menunjukkan peningkatan kesejahteraan masyarakat lahan gambut.*
- e. *Hasil hutan non kayu potensi di kawasan rawa gambut tetapi dalam proses pemasaran sangat sulit, belum ada media pemasarannya.*
- f. *Hilangnya sumber daya alam rawa gambut yang menjadi mata pencaharian masyarakat.*
- g. *Menurunnya produktivitas hasil budidaya lahan dan perikanan. Hal ini akan merubah pola berfikir masyarakat*

c. Sosial

- a. *Dampak sosial yang terjadi setelah lahan rawa gambut dijadikan perkebunan kelapa sawit, karena yang mampu mendirikan perkebunan kelapa sawit dari golongan orang yang mampu.*
- b. *Terjadi permasalahan sosial seperti kekurangan air bersih, munculnya berbagai penyakit dan perubahan pola mata pencaharian.*
- c. *Adanya peraturan yang ditetapkan oleh masyarakat seperti tidak bolehnya melakukan perambahan lahan, illegal logging dan pal batas. Tetapi tidak ada kegiatan secara nyata dari pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat dan menyebabkan masyarakat melakukan.*
- d. *Sistem pengelolaan lahan gambut yang salah, misalnya pembangunan perusahaan yang semakin banyak di lahan gambut (pembangunan kanal-kanal).*
- e. *Kriminalitas dan pelanggaran HAM*
- f. *Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan ekosistem rawa gambut di wilayahnya.*
- g. *Perusahaan merubah perilaku masyarakat yang konsumtif*

Setelah presentasi dari region Sumatra, tidak ada tanggapan. Sehingga acara dilanjutkan ke sesi berikutnya.

2.6. Penyusunan kesepakatan dalam Pengelolaan Kawasan Rawa Gambut

| | |
|---------------------|---|
| <i>Hari/tanggal</i> | <i>: Selasa/ 21 april 2009</i> |
| <i>Tempat</i> | <i>: Pakuan Room - Hotel Salak Bogor</i> |
| <i>Pukul</i> | <i>: 14.30-16.00 WIB</i> |
| <i>Materi</i> | <i>: Penyusunan kesepakatan dalam Pengelolaan Kawasan Rawa Gambut</i> |
| <i>Fasilitator</i> | <i>: Joko Waluyo</i> |

Pada sesi ini, peserta ditawarkan untuk mencari fokus bahasan prioritas yang akan diangkat oleh setiap region. Peserta diberi kesempatan untuk melakukan diskusi di dalam kelompok.

Diskusi dilakukan sambil menikmati *Coffee break*. Peserta melakukan diskusi selama kurang lebih 45 menit.

Agenda prioritas region **Kalimantan** adalah sebagai berikut :

a. Ekologi

1. Merehabilitasi lahan secara menyeluruh di lahan gambut, pada lahan-lahan yang sudah rusak, dengan menanam tanaman lokal yang ada di sana.
2. Meninjau ulang proyek-proyek yang merusak lahan gambut, upaya merehabilitasi lahan gambut
3. Mendorong inisiatif masyarakat dalam upaya pengelolaan lahan gambut (peran aktif perangkat desa)

b. Ekonomi

1. Program pengembangan perekonomian masyarakat lokal.
2. Peran penuh masyarakat dalam menerima kebijakan dari pemerintah.
3. Meninjau kembali peran dan kebijakan pemerintah mengenai pengelolaan.

c. Sosial

1. Peningkatan kapasitas aparat desa, lembaga adat desa dan perangkat-perangkat desa yang lain.
2. Mengingat kembali nilai-nilai kearifan lokal dan tradisional di dalam kawasan gambut.

Sedangkan agenda prioritas region **Sumatra** adalah sebagai berikut :

a. Ekologi

1. Kebijakan mengenai tata ruang, pengelolaan kawasan atau blok hutan dan informasi data yang akurat.
2. Moratorium ekosistem rawa gambut dengan cara stop ekspansi sawit dan HTI
3. restorasi lahan gambut dengan cara rehabilitasi, perbaikan lahan dan pengendalian kebakaran.

b. Ekonomi

1. Fasilitasi untuk memperkuat kapasitas masyarakat untuk mengelola ekosistem rawa gambut.
2. Membangun pengelolaan ekonomi alternatif yang berkelanjutan berbasis potensial lokal. Contoh budidaya lokal
3. Mendorong kebijakan pemanfaatan jasa lingkungan, untuk kesepakatan pengelolaan hutan.

c. Sosial

1. Mediasi konflik antara masyarakat dan para pihak sosial dalam pengelolaan ekosistem rawa gambut.
2. Menciptakan kemitraan yang setara antar para pihak, dengan cara pendampingan pengakuan hak dan melakukan perbincangan.
3. Penguatan kelembagaan adat dan lokal yang ada di daerah masing-masing dan perlindungan hukum adat masyarakat.

Setelah penyampaian agenda prioritas, tidak ada diskusi yang dilakukan. Acara ditutup oleh Fasilitator Bapak Joko Waluyo.

III. PELAKSANAAN SEMINAR

3.1. Art Performance (Pembukaan)

| | |
|----------------------|--|
| <i>Hari/tanggal</i> | : <i>Rabu, 22 april 2009</i> |
| <i>Tempat</i> | : <i>Istana Ballroom - Hotel Salak Bogor</i> |
| <i>Pukul</i> | : <i>10.30-10.15 WIB</i> |
| <i>Materi</i> | : <i>Pembukaan Seminar dan Art Performance</i> |
| <i>Pengisi Acara</i> | : <i>Rianti dan Sanggar Mayang Arum</i> |

Acara seminar dibuka pada pukul 10.00 WIB oleh MC yaitu Rianti. Pembukaan acara mundur 30 menit dari jadwal yang diakibatkan oleh keterlambatan pembicara. Setelah membuka acara, MC memaparkan kepada peserta mengenai agenda acara. Selain dibuka oleh MC, sebagai simbol dimulainya acara ini, pembukaan diisi dengan tarian Ronggeng Nyentrik yang dibawakan oleh tiga orang penari dari sanggar Mayang Arum. Tarian ini merupakan tarian perpaduan antara seni sunda dan modern. Tarian ini diiringi oleh music tradisional sunda yang dipadu dengan music modern. Tariana Ronggeng Nyentrik dibawakan selama kurang lebih sepuluh menit.

3.2. Sesi I "Rawa Gambut untuk Kehidupan".

| | |
|---------------------|---|
| <i>Hari/tanggal</i> | : <i>Rabu, 22 april 2009</i> |
| <i>Tempat</i> | : <i>Hotel Salak Bogor-Istana Ballroom</i> |
| <i>Pukul</i> | : <i>10.30-12.30 WIB</i> |
| <i>Materi</i> | : <i>Rawa Gambut untuk Kehidupan</i> |
| <i>Moderator</i> | : <i>Antonius Kisworoi (Ruai TV - kalbar)</i> |
| <i>narasumber</i> | : |
| | <ol style="list-style-type: none">1. <i>Sony Keraf (Komisi Lingkungan-DPR RI),</i>2. <i>Mohammad Djauhari, (Koordinator KpSHK-Bogor),</i>3. <i>Fitrian Ardiansyah (WWF)</i> |

Sesi ini dibuka oleh moderator. Selanjutnya moderator mempersilahkan narasumber yaitu Bapak Sony Keraf (Komisi Lingkungan-DPR RI), M. Djauhari (KpSHK), dan Fitrian (WWF). Acara sedikit terlambat karena narasumber bapak Fitrian belum hadir. Sepuluh menit kemudian narasumber sudah datang. Kesempatan pertama diberikan kepada bapak Sony Keraf untuk menyampaikan materinya mengenai Kebijakan Kehutanan tentang Rawa-Gambut.

Secara garis besar materi yang diberikan oleh Bapak Sony Keraf adalah sebagai berikut:

" Sebelum berbicara lebih jauh, kita harus merefleksikan kembali mengenai kebijakan-kebijakna yang ada saat ini. Menurut beliau, kebijakan yang ada saat ini belum sesuai dengan alur pembangunan di Indonesia. Kita harus merenungkan kembali, banyak pembangunan di Indonesia anti kesejahteraan rakyat dan pada akhirnya kebijakan pembangunan yang diambil justru memiskinkan masyarakat. Padahal, jika diteliti lebih cermat, pengambilan kebijakan dilatarbelakangi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tetapi hasil akhirnya malah tidak mendatangkan kesejahteraan ekonomi dan tidak menyejahterakan masyarakat. Keuntungan dari kebijakan tersebut hanya akan dirasakan oleh kapitalis, pemilik modal dan umumnya pendatang dari luar yang dapat menghancurkan modal masyarakat domestic. Contoh kasus yang ada saat ini adalah di Jawa tengah, yaitu rencana pembangunan Semen Gresik di Pati Jawa Tengah. Rencana

ini ditentang oleh suku setempat yakni suku Samin. Tetapi dari sudut pandang pemerintah (Gubernur) penentang kebijakan pembangunan Semen Gresik termasuk Bapak Sony Keraf, dipandang sebagai orang yang anti kesejahteraan masyarakat. Padahal beliau percaya bahwa pembangunan Semen Gresik merupakan sumber kemiskinan masyarakat dan menyebabkan kerusakan lingkungan yang pada akhirnya dapat menghancurkan ekonomi masyarakat. Selain itu, adanya Semen Gresik, masyarakat akan kehilangan sumber irigasi yang berdampak pada hasil pertanian.

Hal ini dapat dikaitkan dengan perubahan lahan di lahan sawit yakni peruntukkan lahan yang tidak sesuai dengan fungsi habitatnya. Jika perubahan lahan di rawa gambut dilakukan untuk mensejahterakan rakyat, maka sesungguhnya pemikiran tersebut salah. Dengan pola yang seperti ini bukan hanya kesejahteraan masyarakat yang dihancurkan, aspek lain yang dihancurkan ekologi dan sosial. Misalnya kasus pembangunan Semen Gresik di Jawa Tengah akan merubah pola pertanian dan adat istiadat serta kepercayaan masyarakat setempat. Dengan masuknya sawit yang monokultur dan bukan tanaman setempat maka akan merusak. Selain itu konversi sawit juga merupakan modus pencurian kayu hutan yang hanya mendatangkan kepentingan ekonomi bagi beberapa pihak saja. Pembangunan dengan model tersebut, tidak community base tersebut, people center, berbasis masyarakat.

Pembukaan sawit saat ini sudah menyentuh berbagai daerah, Sumatra, Papua, Kalimantan dll. Jika dilakukan terus menerus maka suatu saat daerah-daerah tersebut akan menjadi daerah yang rawan bencana. Oleh karena itu perlu dilakukan beberapa gerakan salah satunya yaitu mendorong pemerintah untuk merubah pola pembangunan. Pembangunan harus dilakukan berdasarkan potensi daerah setempat. Misalnya dengan tanaman-tanaman lokal masyarakat. Dengan demikian, kesejahteraan masyarakat akan meningkat. Ekosistem dan ekologi pasti akan terus terjaga karena pembangunan berdasarkan kearifan lokal masyarakat. Jika pembangunan disesuaikan berdasarkan masyarakat, maka dasar-dasar sosial masyarakat akan tetap terjaga”.

Setelah Bapak Sony Keraf menyampaikan materinya, kesempatan kedua adalah Bapak **M. Djauhari** untuk menyampaikan materinya tentang **Permasalahan Sosial dan Ekologi di Rawa-Gambut**.

Secara garis besar, materi yang disampaikan adalah sebagai berikut (materi terlampir):

“Sebelum menyampaikan materi, pembicara menyampaikan terlebih dahulu mengenai KpSHK. KpSHK merupakan jaringan LSM yang mengangkat tema tentang pengelolaan kawasan hutan, saat ini terdapat 37 anggota dan 22 komunitas adat, 22 individu yang berkontribusi mengenai pengelolaan kawasan hutan.

Sejak dulu, terdapat tarik menarik yang cukup keras mengenai kawasan hutan di Indonesia (batas) antara masyarakat dan pemerintah. Dalam hal ini pemerintah merasa bahwa hutan merupakan milik Negara dan hal inilah yang menyebabkan ketimpangan di masyarakat. Pada awalnya setiap masyarakat memiliki pola pengelolaan hutan tersendiri contohnya di Simpung, tembung, parang (Sumbang).. Dengan adanya hak Negara terhadap kawasan hutan hal ini tidak pernah diangkat sebagai potensi. Hal ini menyebabkan perdebatan antar hutan Negara dan hutan rakyat sejak zaman kolonial. Pada zaman kolonial terdapat pengelolaan berbasis emansipasi rakyat contohnya Tumpang Sari. Pada intinya, sejak dulu rakyat sudah menguasai dengan apa yang disebut kawasan hutan. Perubahan kebijakan terus terjadi, tetapi hak kelola masyarakat di kawasan

hutan tidak pernah terjadi. Produk kebijakan setelah revisi kehutanan menjadi kehutanan 41/99 sudah menyebutkan adanya partisipasi masyarakat secara aktif. Namun setelah adanya perubahan tersebut pada faktanya tidak terjadi perubahan.

Hal-hal diatas dapat dikaitkan dengan Isu-isu alih fungsi lahan di rawa gambut sudah menarik berbagai pihak termasuk di dalamnya pihak luar negeri. Fakta yang ada saat ini adalah tidak adanya sinkronisasi kebijakan lahan gambut tiap departemen. Lahan Gambut saat ini menjadi perebutan semua pihak antara lain lokal, internasional, pemerintah, dll. Hal ini patut diantisipasi bahwa pihak-pihak yang mengidolakan rawa gambut hanya diambil keuntungan ekonominya serta tidak memikirkan kesejahteraan masyarakat setempat. Saat ini semua pihak harus memikirkan masa depan rawa gambut, dan tidak hanya berpikir dari sudut pandang ekonomi saja”.

Materi selanjutnya disampaikan oleh Fitriani Ardiansyah (Direktur Program Iklim dan Energi WWF-Indonesia). Materi yang dibawakan adalah tentang Dampak Perubahan Rawa Gambut terhadap Iklim. Secara garis besar isi materi adalah mengenai dampak pembukaan rawa gambut yang dikaitkan dengan pelepasan emisi oleh Rawa Gambut. Selain itu pembicara juga menyinggung tentang pembukaan Lahan Gambut untuk perkebunan Kelapa Sawit. Secara lengkap materi dapat dilihat pada lampiran.

Setelah ketiga narasumber menyampaikan materi, moderator memberikan kesempatan kepada masyarakat yang hadir untuk menyampaikan testimoni. Presentasi masyarakat dibagi menjadi dua kelompok yakni region Sumatra dan Region Kalimantan. Isi presentasi masyarakat dari masing-masing region adalah permasalahan dan agenda prioritas masyarakat di kawasan Rawa-Gambut yang dibahas pada saat Workshop sebelumnya.

Diskusi, Tanya Jawab - Sesi I

Setelah pemaparan masyarakat, acara dilanjutkan dengan diskusi. Diskusi yang terjadi adalah sebagai berikut:

1. **T** : Tuntutan masyarakat adat atau lokal dari dahulu tetap sama yaitu ingin mendapatkan manfaat dari sumber daya alam sebanyak banyaknya. Pada kenyataannya masyarakat adat selalu tersisihkan atau tidak mampu untuk bersaing dengan masyarakat pendatang. Sumber daya alam tetap sama tetapi isunya yang berubah-ubah. Bagaimana solusi agar masyarakat adat tidak ketinggalan lagi atau mampu bersaing dengan masyarakat luar?. Bagaimana cara untuk dapat menjamin masyarakat adat agar tidak tersisihkan lagi dan masyarakat dapat berpartisipasi? (**Kariodosan**)

J : 1. Kita mempunyai potensi sumberdaya alam lahan gambut yang besar, tetapi kita melupakan mereka masyarakat yang hidup di sekitar lahan gambut tersebut....”. Di Bali yang menjadi isu central yang diangkat adalah pengelolaan lahan masyarakat sekitar hutan, rakyat sekitar tidak harus pmdanya karena itu terlalu formal, yang seharusnya dilakukan adalah diskusi kepada pemerintah mengenai keinginan masyarakat (**Sony Keraf**)

2. Sejak tahun 2007-sekarang menjadi tim negosiasi Indonesia, dalam rangka isu pengurangan emisi, deforestasi dan degradedasi. Pemerintah melakukan segala macam bentuk negosiasi, jadi pemerintahlah yang seharusnya mengakui keberadaan masyarakat adat. Indonesia dalam konteks keberadaan masyarakat adat tidak mendukung dan tidak pula menolak. Pekerjaan untuk pemerintah Indonesia adalah merancang undang-undang

atau peraturan yang mengatur kesejahteraan dan nasib masyarakat adat dalam memanfaatkan sumber daya alam yang ada. Apakah kita akan melihat sistematis yang ada di Indonesia. karena saat ini yang dibutuhkan adalah pengujian yang lebih tepat. Kemarin sudah dicanangkan peraturan mengenai rawa gambut di tingkat nasional, tetapi baru disepakati mengenai jumlah emisi yang dikeluarkan di suatu perusahaan dan karbon yang di hasilkan oleh rawa gambut itu sendiri. (**Fitrian Ardiansyah-WWF**)

3. Pada saat terdapat isu apapun, apabila pengelolaannya tidak ada jaminan dari pemerintah. di kalangan nasional, maka kita tidak mempunyai posisi yang kuat di kalangan internasional....". Sejak dahulu kita selalu membangga-banggakan dan selalu memakai peraturan Kolonial. Sejak saat kita harus berperilaku bagaimana memikirkan kebijakan nasional. Secara proses pemikiran kolonial telah melekat secara turun temurun di masyarakat kita. Seharusnya semua pihak yang harus turun tangan untuk mengatasi hal tersebut, tetapi yang turun untuk menyelesaikan persoalan tidak semua pihak. Pada saat para pihak merasa telah terbayar dianggap telah selesai semua persoalan. Terdapat mekanisme yang sangat signifikan yaitu mengadopsi berbagai model-model pemikiran yang ada di lokal atau masyarakat adat. Permasalahan dasar tentang pengelolaan hutan di Indonesia tidak akan selesai apabila pemikirannya masih menggunakan pemikiran yang kolonial (**M. Djauhari**).

2. **T** : Tertarik yang disampaikan oleh Pak Sony dan sepakat dengan pernyataan tersebut, karena pengelolaan hutan konservasi sudah cukup lama terdapat pada undang-undang hutan konservasi sejak 1916. Terakhir pada masa kolonial UU No. 167 tahun 1941 yaitu mengenai pengelolaan alam yang berlaku pengelolaan cagar alam dan suaka margasatwa. Menteri pertanian menyebutkan pada tahun 1951 bahwa hutan konservasi boleh dimanfaatkan, tetapi pada saat ini telah dicabut. Pada saat ini keadaan yang di lapang rakyat tidak bisa bersinkronisasi atau tidak bisa memanfaatkan hasil hutan, karena dengan sistem undang-undang yang ada sekarang mereka langsung ditangkap apabila mereka mengambil dan akibatnya antara pemerintah (Pengelola taman nasional) dengan masyarakat sekitar hubungannya tidak harmonis. Bagaimana bapak sebagai anggota DPRD (Dewan Pemimpin Rakyat Daerah) dapat memberikan alternatif solusi mengenai permasalahan tersebut? (pertanyaan tersebut ditujukan kepada Pak Sony). Manfaat lahan gambut untuk mensejahterakan masyarakat itu seperti apa bentuknya? (pertanyaan di berikan kepada Fitrian Ardiansyah WWF). (**Gunung W.Sinaga-TNTP**)

J : 1. masyarakat secara turun temurun tidak dilarang untuk memanfaatkan SDA (Sumber Daya Alam) di zona pemanfaatan ada di kawasan tersebut. Masyarakat yang turun temurun di daerah tersebut justru tidak merusak, karena mereka memiliki kearifan tradisional yang selalu beranggapan hutan merupakan sumber daya alam yang harus dijaga dan dapat dimanfaatkan tetapi harus secara lestari. Masyarakat lokal yang harus diikuti sertakan untuk ikut bekerjasama menjaga kawasan. Oknum masyarakat yang merusak hutan biasanya dari masyarakat luar kawasan yang tidak turun temurun ada di kawasan tersebut. Jadi masyarakat lokal yang turun temurun yang mendulang emas di Kalimantan seharusnya jangan dihukum, tetapi dilakukan pendampingan, diberikan penyuluhan dan diberikan modal untuk dapat berusaha lain. Di undang-undang peraturan mengenai kesejahteraan masyarakat adat di sekitar hutan belum ada. Undang-undang yang ada sekarang bersifat kaku dan belum terdapat peraturan yang

menerangkan perizinan untuk masyarakat adat dalam memanfaatkan sumberdaya alam (**Sony Keraf**).

2. sampai saat ini pihak WWF masih fokus terhadap perubahan iklim, tetapi saat ini sedang menuju ke arah aspek sosial masyarakat dan ekologi rawa gambut. Saat ini yang sering dilupakan oleh sebagian besar orang Indonesia adalah dampak negatif bagi lingkungan dari pembukaan lahan gambut (**Fitrian Ardiansyah-WWF**)

3. **T** : Permohonan kepada Pak Sony sebagai fungsi dewan perwakilan daerah untuk lebih memperhatikan nasib kesejahteraan masyarakat rawa gambut yang ada di Indonesia. Di kursi politik, permasalahan lahan gambut sebenarnya terletak ditingkat mana?, apabila nanti kita telah mengetahui bagian kebijakan mana yang bermasalah, kita dapat langsung melawannya dan memberikan solusinya. Fungsi legeslatif untuk mengatasi setiap permasalahan yang ada di rawa gambut itu apa?

J : “Saya sangat khawatir yang menjadi korban yang paling utama adalah sumber daya alam...”. Fraksi pembangunan daerah belum maksimal kerjanya, hal ini terlihat dari belum maksimalnya dipasar peralihan Sealain itu ditanggapi pula oleh M. Djauhari yang menyatakan bahwa disisi lain Pak Sony sebagai wakil rakyat yang memperjuangkan rakyat di parlemen, tetapi disisi lain pendapat ataupun keputusan Pak Sony ditentang oleh sebagian rakyat. (**Sony Keraf**).

4. **T** : Saya secara individu sangat setuju dengan pernyataan Pak Sony mengenai permasalahan semen Gresik”. Banyak investor illegal yang masuk dan menyebabkan hasil hutan semakin habis. Apakah saya harus menerima atau menolak masuknya investor yang ingin membangun perkebunan kelapa sawit yang ada di tanah Papua? (**Fredi-Papua**)

J : Saat ini saya sedang melakukan koordinasi di jajaran dewan dengan cara melakukan koordinasi di dalam daerah tersebut sendiri. Saat ini diperlukan pemimpin yang pro-lingkungan. Permasalah saat ini yang harus diperhatikan pemerintah adalah masalah pangan. Seharusnya pemerintah tidak perlu melakukan pemerataan pangan secara nasional. Masyarakat Indonesia seharusnya semuanya tidak harus makan makanan pokoknya berupa nasi, karena menyebabkan Bupati, Gubernur berlomba-lomba untuk memasukan investor untuk mensejahterakan masyarakat dan beranggapan bahwa majunya suatu daerah adalah apabila rakyatnya mampu makan nasi, padahal belum tentu. Seharusnya dengan tetap menjunjung kebudayaan lokal dan daerah dan memiliki anggapan bahwa indikator sejahteranya suatu rakyat maju karena mereka mampu makan nasi. Sebenarnya masyarakat dengan memakan makanan pokok daerahnya sendiri yang tidak harus nasi dapat mengatasi permasalahan ketahanan pangan nasional.

5. **T** :Sebagian besar lahan gambut yang ada di Indonesia (56 %) terdapat di Riau, tetapi saat ini pengelolaannya tidak pro dengan masyarakat sekitar karena masuknya investor. Kemiskinan masih terjadi di daerah Semenanjung Kampar, dimana 90% masyarakat miskin, padahal di kawasanya terdapat perusahaan telah maju pesat. Semestinya kalau perusahaan itu berniat baik mereka dapat memberikan kesejahteraan yang nyata kepada masyarakat. Keputusan kebijakan saat ini tidak memperhatikan kepentingan masyarakat, Keputusan Presiden no 32 tahun 1990, yang menyatakan lahan gambut lebih dari 3 meter harus sudah dijadikan sebagai kawasan lindung, Jadi menurut Pak Sony bagaimana menurut bapak dengan pandangan tersebut?.

J : Saat ini, Perlu adanya diperbaiki system yang ada didalam pemerintahan. Saat ini rakyat yang sejahtera adalah rakyat kapitalis yaitu para pengusaha, tetapi bukan masyarakat lokal (**Fitrian Ardyansyah- WWF**).

6. (Opini) Upaya yang dapat dilakuakn untuk memperbaiki masalah hutan lindung dan lahan gambut, semua stakeholder baik dari kehutanan, pertanian, masyarakat adat harus duduk bersama untuk mendiskusikan masalah tersebut. Hal tersebut perlu dilakukan karena kebijakan dari masing-masing kepentingan tersebut sangat berbeda. Saat ini izin pengusahaan suatu lokasi yang bertanggung jawab adalah bupati, semestinya hal tersebut tidak baik karena akan menyebabkan kesalahan dalam memberikan kebijakan karena ada unsur nepotisme. Kebijakan mengenai perizinan seharusnya cukup di tingkat I yaitu tingkat gubernur saja. Langkah selanjutnya seharusnya kita melakukan pendekatan kepada masyarakat terlebih dahulu sebelum kita merumuskan permasalahan mengatasi solusinya. Perkebunan kelapa sawit yang ada di Indonesia yang menjadi investor terbesar orang asing, seharusnya mereka juga ikut memikirkan tentang permasalahan yang terjadi di kawasan lahan gambut. Seharusnya pemerintah tidak perlu mempunyai banyak peraturan tetapi dalam kenyataanya rakyat belum merasakan dampak dari kebijakan tersebut (**Urip Widodo**).

Pemberian kenang -kenangan

Setelah diskusi berakhir, acara dilanjutkan dengan pemberian kengan-kenangan kepada pembicara. Kenang-kenangan diberikan oleh M.Dajuhari kepada masing-masing pembicara.

3.3. ISHOMA (12.30-13.30)

3.4. Sesi II “Diskusi Panel ”

Hari/tanggal : Rabu, 22 april 2009
Tempat : Hotel Salak Bogor-Istana Ballroom
Pukul : 12.30-16.15 WIB
Materi : *Alih Fungsi dan Pemanfaatan Rawa Gambut*
Moderator : *Kornelis Purba (Jakarta Post)*
Narasumber :

1. *Maruli Gultom (Sektor Perkebunan Sawit dan Biofuel PTPN V),*
2. *Abet Nego Tarigan (Direktur Eksklusif Sawit Watch),*
3. *Arya Hadi Dharmawan (Dosen MK. Teori Sosial Hijau dan MK. Ekologi Politik Kawasan pada Program Studi/ Mayor Sosiologi Pedesaan-Pasca Sarjana IPB),*
4. *Neil Franklin (Sustainability Director, Asia Pacific Resources International), Bustar Maitar (Senior Forest Campaigner Greenpeace),*
5. *Huda Aksani (Deputi III-Lingkungan Hidup Bidang Rawa),*
6. *Herman Daryono (Departemen Kehutanan Badan Penelitian Dan Pengembangan Kehutanan Pusat Litbang Hutan Dan Konservasi Alam).*
7. *Bustar Maitar (Direktur bagian Kampanyedan Advokasi Kehutanan, Greenpeace – Indonesia)*

Pada sesi ini dibuka oleh moderator yang bernama Kornelis Purba, yang bekerja sebagai Redaktur pelaksana Jakarta Pos. pada sesi ini dimana kalangan LSM (Lembaga Sosial Masyarakat) dan para pengusaha bertemu, untuk berdiskusi. Moderator memberikan salam

hangat kepada para peserta seminar dan langsung dilanjutkan dengan presentasi oleh masing-masing pembicara.

Presentasi pertama ditujukan kepada **Bustar Maitar**, yang merupakan perwakilan dari Greenpeace. Pada presentasi kali ini Bustar menyampaikan bahwa Greenpeace banyak mengedepankan fakta yang ada di lapangan. *Salah satu kegiatan Greenpeace adalah mengadakan kampanye mengenai lingkungan, adapun salah satu materi kampanyenya adalah menyelamatkan iklim dan hutan. Bustar Maitar mengemukakan bahwa total gambut di dunia ada 42 juta ha dan hutan gambut yang masih alami terdapat di Papua Indonesia dengan kondisi yang tidak ada akses untuk menuju tempat tersebut. Menurut pendapat Bustar, Indonesia memiliki 60 % lahan gambut di dunia. Gambut yang merupakan habitat dari berbagai spesies satwa dan tanaman, gambut juga memiliki fungsi sebagai penyeimbang ekosistem sekitarnya dan juga penyeimbang iklim. Gambut yang memiliki kedalaman lebih dari 3 meter sudah termasuk dalam lahan gambut yang harus dilindungi. Selain itu, Bustar mengemukakan bahwa kebakaran hutan yang menghabiskan 8 juta hektar lahan gambut telah mengeluarkan emisi ke atmosfer. Bustar dalam presentasinya menjelaskan konversi lahan gambut yang terjadi selama ini adalah ekspansi untuk perkebunan kelapa sawit, HTI, proyek sejuta hektar hal ini mudah terjadi karena pemberian ijin bukan saja diberikan oleh Departemen Kehutanan tetapi oleh beberapa departemen yang menyebabkan ketidak sinkronisasi antar kebijakan masing-masing departemen. Akibat adanya konversi gambut yang ada di Negara Indonesia, Indonesia mengeksport asap akibat kebakaran hutan setiap tahun, melepas emisi di atmosfer yang berlebihan, dimana berdampak pada suhu bumi semakin panas. Bustar menjelaskan beberapa kegiatan greenpeace dalam ikut berpartisipasi dalam bencana tersebut adalah menutup kanal yang bertujuan agar air gambut tidak kering yang ada di daerah Riau. Bustar mengemukakan tuntutan greenpeace saat ini adalah menghentikan konversi hutan rawa gambut secara sementara di Indonesia dan melakukan perlindungan secara total di kawasan gambut.*

Setelah presentasi pertama selesai, moderator langsung mempersilahkan kepada penyaji kedua yaitu Abet Nego Tarigan yang merupakan Direktur Eksklusif Sawit Watch.

Abet Nego Tarigan mengemukakan tentang realita tentang kondisi saat ini, yaitu semakin banyaknya perusahaan yang menguasai lahan sawit di Riau, Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. Semua ini berarti lahan gambut dialokasikan untuk perkebunan kelapa sawit. Saat ini yang terpenting untuk diketahui adalah lahan gambut yang merupakan kawasan terabaikan. Pemerintah menganggap lahan gambut produktif untuk dibangun, tetapi disamping itu terdapat masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan lahan gambut. Kawasan gambut yang ada di Indonesia rentan dengan terjadinya konflik, misalnya yang terjadi di Sumater, dimana telah terjadi konflik antara masyarakat dengan perusahaan yang ada di kawasan tersebut. Hal ini menunjukkan tidak adanya kepedulian pemerintah terhadap masyarakat sekitar kawasan lahan gambut. Kondisi pemerintah saat ini lebih insensif untuk bergerak ke perkebunan kelapa sawit dan sektor yang lain. Kenyataan yang terjadi saat ini di lapangan adalah masyarakat tidak memiliki insentif untuk mengelola lahan rawagambut. Dalam penjelasannya Abet Nego Tarigan juga membahas mengenai kawasan gambut yang merupakan kawasan konservasi masyarakat saat ini sedang menghadapi situasi yang sulit mengenai perubahan lahan gambut yang dikonversi sebagai lahan perkebunan sawit. Selain itu, adanya instruksi presiden untuk merehabilitasi hutan dan mengeluarkan kebijakan yang terakhir yaitu mengolah lahan gambut untuk perkebunan kelapa sawit. Izin yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mendirikan perusahaan di lahan gambut bersifat legal, hal ini menunjukkan terdapat kepentingan tersendiri yang menyebabkan keresahan para LSM. Oleh karena

itu, terkait dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah tersebut Sawit Watch menuntut agar dilakukan pembatalan segera usaha konversi lahan gambut dan merevisi kembali perjanjian-perjanjian yang telah ditetapkan. Abet Nego Tarigan memberikan pesan untuk pemerintah untuk segera mengatasi permasalahan gambut dengan cara menetapkan mekanisme kebijakan yang permanen dalam mengatasi permasalahan gambut.

Setelah Abet Nego Tarigan mengemukakan presentasinya, moderator langsung mempersilahkan Marulli Gultom, sebagai penyaji ke tiga.

Marulli Gultom dalam memaparkan presentasinya memberikan penjelasan bahwa perkebunan kelapa sawit akan merusak lahan gambut adalah pernyataan tidak benar, tetapi juga harus dilaksanakan dengan prosedur yang sebenarnya (HCVF). Prosedur dalam pembukaan lahan gambut secara benar antara lain dengan membuat parit dan tidak menggunakan pestisida. Selain itu usaha yang dapat dilakukan adalah melakukan pemberdayaan masyarakat, misalnya dengan meningkatkan aktivitas dan kreativitas masyarakat dengan adanya perusahaan perkebunan sawit. Marulli Gultom juga mengungkapkan dengan adanya perusahaan akan meningkatkan infrastruktur dan pembangunan di daerah sekitar hutan dan akan mampu menyebabkan masyarakat akan lebih sejahtera. Hal ini terlihat dari pendapatan masyarakat yang akan semakin naik dan perusahaan perkebunan sawit telah mendirikan sekolah, perpustakaan dan juga fasilitas bagi rumah para gurunya. Semua itu merupakan kontribusi perusahaan terhadap masyarakat sekitar hutan rawa gambut, kontribusi perusahaan yang lain adalah mengajarkan masyarakat untuk bertani coklat, sawit, pembuatan batu-batu bata, peternakan dan memperbaiki akses jalan menuju ke desa. Kontribusi yang diberikan oleh perusahaan juga berupa pelayanan kesehatan, yaitu dengan menyediakan dokter dan poliklinik. Marulli Gultom memberi penjelasan bahwasana adanya perusahaan di kawasan lahan gambut, mengajarkan masyarakat untuk hidup lebih moderat. Marulli Gultom memberikan sanggahan bahwa penyebab global warming adalah sawit, menurut Marulli Gultom yang menyebabkan global warming adalah perusahaan-perusahaan yang ada di Negara-negara maju, dimana mereka mengeluarkan emisi yang cukup banyak. menurutnya, Indonesia bukan penyebab utama terjadinya global warming dan perkebunan sawit juga merupakan bukan penyebab utama terjadinya kerusakan hutan. Pesan terakhir dari Marulli Gultom adalah alih fungsi lahan rawa gambut boleh bisa dijadikan menjadi perkebunan kelapa sawit tetapi harus sesuai dengan prosedur yang ada dan perkebunan kelapa sawit adalah jalan menuju kesejahteraan.

Setelah pembicara ke tiga selesai, moderator langsung mempersilahkan Neil Franklin untuk memaparkan presentasinya.

Pada kesempatan ini, **Neil Franklin** mengemukakan bahwa pihak HTI mendukung penuh pembangunan social. Neil Franklin juga mengemukakan bahwa 70-90 % emisi gambut dapat dihindari dengan cara masyarakat dapat berkolaborasi dengan model HTI yang telah ditetapkan. Mengatasi permasalahan lahan gambut harus melibatkan semua pihak yang berkepentingan. Hutan yang merupakan penghasil karbon terbesar, maka pihak kehutanan dan juga HTI dapat memaksimalkan dalam memproduksi karbon tersebut untuk mengurangi emisi yang berlebihan. Neil Franklin mengemukakan bahwa pihak kehutananlah yang seharusnya bertanggung jawab dan memberikan solusi atas perubahan iklim. Solusi perubahan iklim dapat dilakukan dengan konsep HCVF dan dilakukannya mozaik konversasi. Neil Franklin mengemukakan bahwa 70 % wilayah APRIL adalah kawasan konservasi Karena itu hutan juga harus lestari walaupun HTI masuk dalam kawasan lahan rawa gambut. Menurut pendapat Neil Franklin ilmu yang dipergunakan

dalam mengelola kawasan HTI belum maksimal, seharusnya dengan pengelolaan air yang tepat maka emisi karbon dioksida bisa dicegah (Eco-Hydro). Hasil yang telah ditunjukkan dengan pengelolaan Eco-Hydro adalah emisi karbon dioksida banyak dikurangi. Neil Franklin juga menerangkan bahwa HTI apabila diatur dengan baik dapat bermanfaat dan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat sekitar hutan dan hal tersebut telah dibuktikan oleh APRIL.

Setelah pembicara ke empat selesai, moderator langsung memberikan kesempatan kepada pembicara yang ke lima yaitu Herman Daryono yang merupakan perwakilan dari Departemen Kehutanan Badan Penelitian Dan Pengembangan Kehutanan Pusat Litbang Hutan Dan Konservasi Alam.

*Pada kesempatan ini **Herman Daryono** mengungkapkan akan rencana departemen kehutanan untuk melakukan proses pengelolaan kawasan gambut. Menurut Herman Daryono kebijakan peraturan kawasan gambut perlu direvisi kembali karena peraturan mengenai ekosistem gambut belum sampai mengatur fungsi pemanfaatan lahan rawa gambut. Peraturan yang ada saat ini belum jelas mengenai pengaturan fungsi pemanfaatan lahan gambut. Saat ini yang menjadi ruang lingkup departemen kehutanan mengenai kawasan lahan gambut sebatas pada ruang lingkup pemetaan kawasan hidrologis gambut, yaitu ekosistem gambut yang dibatasi oleh dua anak sungai, inventarisasi satwa yang ada di Riau, pengelolaan kubah-kubah yang terdapat unit-unit yang nantinya akan dikelola oleh departemen kehutanan. Herman Daryono memberikan penjelasan bahwasanya penetapan kawasan gambut merupakan dasar dari pengelolaan ekosistem gambut. Selain itu, adanya inventarisasi potensi sumberdaya alam yang ada di kawasan rawa gambut dapat menjadi masukan untuk menetapkan kriteria apakah kawasan tersebut termasuk dalam kawasan lindung atau tidak. Adapun kriteria kawasan lindung rawa gambut menurut Herman Daryono adalah wilayah yang memiliki puncak kubah gabut di daerah sekitarnya. Adapun kriteria kerusakan rawa gambut di kawasan lindung apabila gambut, pepohonan atau penutupan lahan yang ada di gambut, pengaturan tata air, adanya indikasi potensi keanekaragaman hayati dan defersifikasi telah mengalami kerudakan yang cukup parah. Herman Daryono menerangkan tentang perbedaan pemanfaatan kawasan lindung lahan gambut dengan kawasan budidaya, dimana kawasan lindung lahan gambut dapat diperuntukan untuk ekowisata dan jasa lingkungan terbatas. Ketentuan peralihan lahan gambut adalah sebagai pedoman untuk mengelola kawasan gambut.*

Setelah penyaji ke lima selesai, moderator langsung mempersilahkan **Huda Aksani** yang merupakan Deputy III-Lingkungan Hidup Bidang Rawa.

***Huda Aksani** memaparkan bahwa gambut memiliki sifat yang spesifik dan berkarakter unik. Menurut Huda Aksani Indonesia memiliki gambut 10 juta ha dan memiliki 27 jenis kayu yang memiliki ekonomi tinggi. Saat ini yang perlu mendapatkan perhatian adalah pengelolaan DOM yang ada disekitar sungai. Menurut Huda Aksani dapat dilakukan dua kegiatan untuk merehabilitasi lahan gambut yang terdegradasi yaitu merehabilitasi/restorasi hidrologi dengan cara penambahan (water canal blocking) drainase. Dari hasil penelitian diungkapkan ternyata apabila dilakukan drainase di bawah air tanah akan menyebabkan kerusakan. Selain itu Huda Aksani menerangkan secara detail mengenai drainase di lahan gambut dan juga menerangkan mengenai typologi lahan. Huda Aksani memberikan pernyataan bahwa ekosistem hutan rawa gambut yang ada di Kalimantan Tengah merupakan contoh lahan yang perlu dikonservasi tipologi lahannya. Huda Aksani juga menerangkan berbagai macam contoh lahan gambut.*

Setelah penyaji ke enam selesai, moderator langsung memberi kesempatan kepada penyaji terakhir yaitu **Arya Hadi Dharmawan**. Materi yang disampaikan Arya Hadi Dharmawan mengenai "Pertumbuhan Ekonomi, Pangan, dan Energi vs Eksistensi Rawa Gambut antara Petaka dan *Survivalism*". Materi telah terlampir pada lampiran...

Arya Hadi Dharmawan merupakan pembicara yang menyimpulkan semua diskusi dari pembicara satu sampai enam. Arya Hadi Dharmawan mengungkapkan bahwasanya lingkungan telah dikorbankan oleh kepentingan Negara, karena untuk memenuhi kebutuhan ekonomi Indonesia. Moderanitas berdampak buruk bagi perkembangan sosialitas masyarakat adat dan adanya HTI dan sawit menyebabkan timbulnya kepentingan-kepentingan kapitalisme. Cadangan karbon terbesar adalah di rawa gambut, apabila gambut telah habis maka cadangan karbon juga akan ikut hilang, maka dari itu lahan gambut harus dikonservasi. Salah satu hal yang menyebabkan kerusakan tata air dan perubahan tata air adalah konversi gambut.

Diskusi, Tanya Jawab - Sesi II

Setelah ketujuh narasumber menyampaikan materi, moderator memberikan kesempatan kepada peserta seminar yang hadir untuk menyampaikan pertanyaan yang ditujukan kepada para pemateri. Adapun hasil tanya jawab antara penyaji materi dan peserta seminar adalah sebagai berikut:

1. **T:** Menurut bapak-bapak yang ada di depan apakah rawa gambut yang menjadi perhatian dari kemarin mengenai masalah ekonomi, ekologi tetapi belum ada bukti solusi pemecahannya. Saat ini kita berbicara secara ilmiah, tetapi kita tidak berbicara mengenai *local practice*, mengenai global warming kita hanya menyalahkan kepada Negara maju saja, tetapi negara kita belum melakukan apa-apa, pahahal negara kita bisa melakukan hal yang sederhana sekalipun (**Mailani Abdul**).
- J:** 1.)Memberikan pendapat bahwa sosial budaya masyarakat sekitar hancur karena masyarakat tersebut berdomisili di kawasan yang telah menjadi pusat industri. Hilangnya budaya-budaya lokal, tidak hanya menjadi masalah *the survival of gambut* tetapi permasalahan *the survival of culture*. Di tingkat nasional kita perlu membahas juga mengenai undang-undang kehutanan, konservasi, sumberdaya air dan undang-undang lainnya mengenai lingkungan. (**Arya Hadi Daharmawan-IPB**).
2.)Kawasan masyarakat ada di sekitar sawit dan perizinan sudah ada. Masih banyak indikasi yang kuat bahwasanya pihak-pihak bersembunyi di balik RSPO untuk menampik segala kesalahan. Industri sebenarnya sudah berusaha meregulasi dirinya sendiri, tetapi yang menjadi masalah para perusahaan bersembunyi dibalik RSPO. "Saya yakin di suatu perusahaan ada yang melakukan pembangunan di sependan sungai, padahal hal tersebut tidak boleh, tetapi itu akan mendapat proses hukum" penjelasan Abet.Undang-undang yang dipergunakan mengenai permasalahan lahan gambut yang dijadikan perkebunan sawit mencakup semua kegiatan yang mengganggu kegiatan perkebunan. Sebagai contoh kasus para pekerja yang melakukan demo di Kalimantan Timur dan terjadi kerusakan. Para pendemo tersebut dihukum kurungan penjara 6 bulan dan itu semua bukti adanya hokum yang berlaku. Posisi masyarakat akan semakin sulit kerana mereka tidak mempunyai sertifikat secara hukum Negara. Terkait dengan beberapa hal, antara lain ketika organisasi pemerintah sipil melaporkan terdapat beberapa usaha mengenai perkebunan kelapa sawit tetapi belum mendapatkan tanggapan yang

- nyata oleh pemerintah, itu semua menunjukkan posisi masyarakat Indonesia pada posisi yang sangat lemah (**Abet Nego Tarigan-Sawit Watch**).
- 3.)Pemerintah yaitu Departemen Kehutanan telah membangun segala fasilitas di sekitar kehutanan.
2. (**opini**) Memberikan pendapat bahwa pada dasarnya ekologi dan ekonomi tidak pernah nyambung. Kenyataan di lapangan tidak sesuai dengan apa yang di bicarakan disetiap foun diskusi. Pada kenyataannya pemerintah pusat dan daerah tidak ada sinkronisasi dan semuanya memiliki masalah dan banyak perusahaan yang tidak melakukan AMDAL (**Nurhani dari yayasan Kalimantan Barat**).
 3. **T:** Memberikan pertanyaan bahwa kalau semua perusahaan yang disampaikan, maka sebenarnya berapa perusahaan yang sudah masuk ke RSPO dan apakah mereka sudah benar-benar melakukan kegiatan tersebut?, pada saat kebakaran hutan yang paling menderita adalah masyarakat sekitar rawa gambut. pada saat kita berbicara gambut, sebaiknya kita sendiri berfikir mengenai saudara-saudara kita yang tertimpa bencana, mereka tidak bisa melakukan aktivitasnya, seperti sekolah, bekerja dan lain sebagainya. Dari pada kita debat sendiri di dalam negeri dan dimana pertanggung jawaban orang luar, yang juga ikut berperan dalam semua permasalahan ini? (**Yustirandus**).
 - J:** "Bukan tidak ada agenda tersembunyi dibelakangnya, kalau ada regulasi nasional yang tidak sesuai dengan kenyataannya, ya buat apa dijalankan". Apabila kita memiliki peraturan yang lengkap tetapi tidak dipergunakan dengan baik buat apa, lebih baik kita tidak punya peraturan yang baik, tetapi kita mengimplementasikan dengan baik. Memajukan perekonomian belum tentu mengubah pola hidup masyarakat setempat, budaya di masyarakat local bisa menjadi koridor dalam penentu kebijakan (**Marulli Gultom-Sektor perkebunan Sawit dan Biofuel**).
 4. **T:** Menyatakan tertarik dengan presentasinya Neil Franklin, tentang Muara Kampar. Lapangan pekerjaan seperti apa yang akan diciptakan oleh perusahaan tersebut?. Sudah lama perusahaan di Muara Kampar itu berdiri, tetapi belum memberikan kesejahteraan terhadap masyarakat (**Irsyadul Halim-Riau**).
 - J:** Memberikan pendapatnya bahwa kemiskinan *absolute* telah terjadi di Muara Kampar, seharusnya perusahaan-perusahaan yang ada di kawasan tersebut dimanfaatkan sebesar-besarnya (**Marulli Gultom**).
 5. **T:** Salah satu peserta menanyakan mengenai definisi kubah gambut di Indopnesia dan apa manfaat kubah gambut tersebut. Apakah kebijakan yang diatur sudah berhasil diimplementasikan di lapangan?. Bagaimana efektifitas kubah gambut?. Bagaimana kita menentukan koridor yang bersifat ekonomi dan ekologi dengan tidak merugikan masyarakat lokal?
 - J:** Gambut adalah tanah hasil okulasi yang melindungi sediment kuarsa, karena suasana anaerob dan basah. Kubah gambut adalah bagian dari ekosistem gambut yang cembung memiliki elevasi lebih tinggi dan berpengaruh terhadap sumber daya lainnya. Kawasan lindung gambut adalah kawasan yang berfungsi untuk melindungi kawasan lindung gambut dalam melindungi kubah gambut dan sedimen. Peraturan

pemerintah mengenai kubah gambut dan kawasan lindung gambut perlu dipelajari dan dikaji lebih dalam lagi (**Huda Aksani-KLH**)

6. **T:** Menyatakan komentar kepada Pak Gultom bahwa selamatkan hutan dan bumi ini. Dalam salah satu film documenter yang dia saksikan, terdapat pesan tersendiri mengenai cerita seorang anak muda yang melakukan studi banding di Sumatera mengenai kesejahteraan masyarakatnya setelah kawasan gambutnya dijadikan perkebunan kelapa sawit, dan anak muda tersebut berharap bahwa lahannya, tetapi pada kenyataannya kawasan lahan gambutnya setelah masuknya investasi untuk mengubah lahan gambutnya menjadi kelapa sawit, tidak seperti yang dia bayangkan, masyarakat tidak tambah sejahtera tetapi justru tambah susah hidupnya (**Kenny-Jayapura Papua**).
- J:** Masalah sosial juga diperhatikan termasuk kesejahteraan dengan hutan rakyat lahan gambut dan perlu diadakan suatu evaluasi. Perbedaan terjadi karena perbedaan sudut pandang dan persepsi, untuk itu perlu dilakukan groundcheck dan pencitraan. Selain itu dapat dilakukan identifikasi juga, pada umumnya daerah di pinggir sungai gambut tipis dan DOM bisa diidentifikasi (**Huda Aksani**).

Setelah diskusi selesai, acara dilanjutkan dengan penyerahan kenang-kenangan kepada para pembicara dan moderator, dimana acara diskusi berakhir pada pukul 16.10 WIB. Setelah penutupan diskusi selesai maka dilanjutkan dengan Keynote speaker oleh Farah Sofa, yang merupakan perwakilan dari kemitraan.

3.5. Keynote Speaker

Keynote speaker oleh Farah Sofa, setelah kegiatan telah berlangsung dua hari. Adapun salam hangat dari Sarah Sofa adalah:

Selamat Sore,,,

Terdapat beberapa catatan dari kegiatan yang berlangsung, yaitu rawa gambut adalah masa depan lingkungan dan masyarakat yang ada di sekitarnya. Pandangan mengenai rawa gambut sekarang telah berbeda dengan pandangan sebelumnya, dimana rawa gambut yang sekarang merupakan kekayaan yang tidak ternilai. Rawa gambut memiliki nilai bagi masyarakat kawasan sekitar. Naik pamornya kawasan gambut pada saat terjadi perubahan iklim, hal ini disebabkan karena emisi karbon secara besar-besaran. Perubahan persepsi mengenai rawa gambut juga terjadi luar biasa, dimana kurang pemahamannya semua pihak dalam bidang ekonomi dan sosial oleh berbagai pihak yang berkepentingan. Pihak yang berkepentingan tersebut salah satunya adalah pihak industri yang berkonsentrasi untuk menyelamatkan rawa gambut. Menanggapi permasalahan tersebut, maka kita memerlukan tata pengelolaan dan klaim beberapa pihak terhadap kawasan gambut, karena sampai saat ini belum jelas yang menjadi sumber kebingungan bagi semua pihak yang terlibat di atas.

Dalam keynote speaker, Farah Sofa mengemukakan beberapa rencana kedepan yang perlu ditindaklanjuti, yaitu:

1. Sudah saatnya ada reformasi pengelolaan lahan rawa gambut.
2. Permasalahan mengenai kawasan lahan rawa gambut harus segera dituntaskan dan segera pembuatan kerangka hukum atau kelembagaan.
3. Antara pemegang resiko dengan penerima manfaat harus seimbang, dimana pemegang resiko terbesar harus mendapatkan keuntungan yang terbanyak.

4. Semua pihak yang berperan dalam kawasan rawa gambut belum memiliki hak dan kewajiban yang jelas.
5. Pentingnya melakukan pendekatan multi level dan multi aktor. Budaya jujur merupakan kunci penting dalam menyelesaikan masalah termasuk jebakan, resiko dan peluang.
6. Memperbaiki tata kelola yang telah ada dan memanfaatkan momentum yang sudah berubah.

3.6. Penutupan

Setelah keynote speaker maka semua rangkaian acara ditutup secara simbolis oleh MC dengan suguhan tarian penutup dari “Sanggar Seni Mayang Arum” yang membawakan tarian *Ringkang Mojang* dibawah pimpinan Akang Gian, tarian ini menceritakan mengenai tingkah laku penari perempuan.

Secara keseluruhan Festival Orang Rawa-Gambut se-Indonesia yang diselenggarakan oleh pihak KpSHK dengan tema “Nol Pemanasan Bumi, Rawa-Gambut untuk Kehidupan” telah berhasil dilaksanakan. Acara yang berlangsung dua hari yang terdiri dari workshop dan seminar ini telah berhasil mengeluarkan ide-ide dan solusi dalam mengatasi permasalahan kawasan rawa gambut. Solusi pemecahan masalah yang menjadi luaran, secara garis besar adalah melakukan pendekatan terhadap masyarakat sekitar kawasan rawa gambut dan mengidentifikasi permasalahan yang ada lalu dibuat suatu perumusan masalah yang nantinya akan sampai pada identifikasi permasalahan dan pemecahan masalah.

LAMPIRAN

- Daftar hadir Peserta Workshop
- Daftar hadir Peserta Seminar
- Materi-materi Presentasi